



**BANK  
SAU**

PT BPD SURABAYA & DAERAH SEKITAR  
KEMENTERIAN PERENCANAAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN PERBURUHAN  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
KEMENTERIAN PERKOTAAN DAN TRANSPORTASI  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN KOTA  
KEMENTERIAN RIWAYAH DAN KEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN SAINS DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSPORTASI  
KEMENTERIAN TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR  
KEMENTERIAN WISATA BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN



# LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA

TAHUN 2025

**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT. BPR SURYA ARTHA UTAMA PERSERODA  
TAHUN 2025**



**JL. WALIKOTA MUSTAJAB NO. 84, Kelurahan Ketabang,  
Kecamatan Genteng, SURABAYA  
TELEPON: 031-5480250**

## 1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT. BPR SURYA ARTHA UTAMA PERSERODA
Alamat	Jl Walikota Mustajab No 84 Surabaya 60189
Nomor Telepon	(031) 5480250

### Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) pada PT BPR Surya Artha Utama Perseroda sepanjang tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif dan konsisten. Hal ini tercermin dari kinerja Bank yang tetap terjaga serta kemampuan beradaptasi terhadap dinamika perekonomian dan perkembangan sektor usaha yang semakin kompleks.

Penerapan Tata Kelola dilaksanakan dengan mengacu pada POJK Nomor 9 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 sebagai landasan dalam memastikan pengelolaan Bank berjalan secara sehat, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Seluruh organ Bank berperan aktif dalam penerapan Tata Kelola, dimana Direksi menjalankan fungsi pengelolaan operasional secara efektif, sementara Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan secara independen dan objektif. Sinergi tersebut memastikan penerapan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran dapat berjalan secara optimal.

Penerapan Tata Kelola dilakukan melalui aspek struktur, proses, dan hasil tata kelola yang didukung oleh kebijakan internal yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten, sehingga mampu melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Ke depan, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola secara konsisten dan berkelanjutan.

### Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	<b>2. Baik</b>
--	----------------

### Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melaksanakan penerapan tata kelola secara umum dengan baik, yang tercermin dari pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola pada seluruh aspek penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan dan pengawasan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didukung oleh struktur dan mekanisme kerja yang memadai. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang bersifat tidak signifikan dan tidak berdampak material terhadap kelangsungan penerapan tata kelola secara keseluruhan. Oleh karena itu, tetap diperlukan upaya penyempurnaan dan tindak lanjut yang memadai, baik dari sisi kebijakan, prosedur, maupun implementasi, agar kualitas penerapan tata kelola dapat terus ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

<b>1.</b>	<b>Nama</b>	<b>RENNY WULANDARI SE MM</b>
	<b>Jabatan</b>	<b>Direktur Utama</b>
	<b>NIK</b>	<b>3576025101710001</b>
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertanggung jawab atas pengelolaan Bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, Anggaran Dasar Perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>b. Merealisasikan pencapaian target kinerja keuangan Bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan usaha secara sehat.</li> <li>c. Memastikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) berjalan secara efektif dengan didukung kecukupan dan kompetensi sumber daya manusia serta sistem pengendalian intern yang memadai.</li> <li>d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit intern, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya secara tepat waktu dan berkesinambungan.</li> <li>e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kinerja Bank kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>f. Mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai secara transparan dan tepat waktu guna mendukung peningkatan kinerja organisasi.</li> </ul>	
<b>2.</b>	<b>Nama</b>	<b>RIRIN DWI SETYONINGSIH SE MM</b>
	<b>Jabatan</b>	<b>Direktur Kepatuhan</b>
	<b>NIK</b>	<b>3576024812740007</b>
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, PPATK, serta peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk pelaksanaan self-assessment tata kelola dan penyampaian laporan kepada regulator.</li> <li>b. Mengarahkan dan mengawasi penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, mencakup risiko kredit, operasional, likuiditas, kepatuhan, reputasi, strategik, dan risiko lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>c. Mengawasi efektivitas Sistem Pengendalian Intern, termasuk koordinasi dengan fungsi audit intern serta pemantauan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan internal maupun eksternal.</li> <li>d. Memastikan penerapan strategi Anti-Fraud serta APU dan PPT berjalan efektif, meliputi aspek pencegahan, deteksi, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut sesuai ketentuan regulator.</li> <li>e. Memberikan rekomendasi terkait aspek kepatuhan dan risiko atas produk, aktivitas, dan kerja sama baru, serta menyampaikan laporan perkembangan kepatuhan dan risiko kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara berkala.</li> </ul>	

**Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:**

- a. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Manajemen Risiko telah dilaksanakan secara konsisten pada seluruh kegiatan operasional dan bisnis Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Tingkat kesehatan Bank senantiasa dijaga dan dipertahankan dalam kondisi sehat melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia melalui evaluasi kinerja secara berkala, pembinaan, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi guna mendukung peningkatan kinerja Bank.
- d. Bank melakukan pemantauan dan tindak lanjut secara intensif terhadap debitur yang mengalami tunggakan sesuai dengan kondisi dan permasalahan masing-masing debitur guna menjaga kualitas kredit.
- e. Seluruh temuan pemeriksaan regulator dan audit intern telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku secara tepat waktu.
- f. Bank telah melakukan sosialisasi serta penguatan Sistem Pengendalian Intern kepada seluruh pegawai dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan meminimalkan risiko operasional.

Bank secara berkelanjutan melakukan evaluasi atas efektivitas tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian intern. Seluruh tindak lanjut dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan guna memastikan kegiatan usaha Bank berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

**3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris**

1.	Nama	PROF. BADRI MUNIR SUKOCO, SE., MBA., PH.D.
	Jabatan	Komisaris Utama
	NIK	3578081109780008

**Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:**

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada seluruh kegiatan usaha BPR di setiap jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional BPR, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- e. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau terdapat kondisi yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha BPR.

<b>2</b>	<b>Nama</b>	<b>HARI FITRIANTO, S.IP., M.IP.</b>
	<b>Jabatan</b>	<b>Komisaris</b>
	<b>NIK</b>	<b>3578301507830001</b>

**Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:**

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada seluruh kegiatan usaha BPR di setiap jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional BPR, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- e. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan atau terdapat kondisi yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha BPR.
- f. Memantau dan memahami perkembangan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.

**Rekomendasi Kepada Direksi:**

- a. Direksi agar mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
- b. Direksi agar meningkatkan efisiensi operasional serta pengendalian biaya secara berkelanjutan guna mendukung kinerja Bank.
- c. Direksi agar terus melakukan pengembangan produk dan layanan secara inovatif dalam rangka merespons perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang semakin dinamis.
- d. Dalam kondisi perekonomian yang penuh ketidakpastian, Direksi agar meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih proaktif dan adaptif.

Rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari fungsi pengawasan dalam rangka memastikan pengelolaan Bank berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara bertahap dan berkelanjutan, serta melakukan evaluasi secara berkala guna meningkatkan kinerja, efisiensi operasional, dan kualitas penerapan tata kelola Bank.

#### 4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

##### Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Komite belum diwajibkan untuk dibentuk mengingat modal inti Bank masih di bawah Rp50.000.000.000,00, sehingga fungsi komite seperti komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi masih dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

##### Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite belum diterapkan karena Bank belum diwajibkan untuk membentuk komite mengingat modal inti masih di bawah Rp50.000.000.000,00, sehingga pelaksanaan fungsi komite masih dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

##### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	RENNY WULANDARI SE MM
	NIK	3576025101710001
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	RIRIN DWI SETYONINGSIH SE MM
	NIK	3576024812740007
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

##### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	PROF. BADRI MUNIR SUKOCO, SE., MBA., PH.D.
	NIK	3578081109780008
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	HARI FITRIANTO, S.IP., M.IP.
	NIK	3578301507830001
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR maupun pada perusahaan lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, sehingga independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tetap terjaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

#### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	RENNY WULANDARI SE MM
	NIK	3576025101710001
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	RIRIN DWI SETYONINGSIH SE MM
	NIK	3576024812740007
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

#### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	PROF. BADRI MUNIR SUKOCO, SE., MBA., PH.D.
	NIK	3578081109780008
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	HARI FITRIANTO, S.IP., M.IP.
	NIK	3578301507830001
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

### Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham tidak memiliki kepemilikan saham pada kelompok usaha BPR, sehingga tidak terdapat potensi benturan kepentingan dan independensi dalam pelaksanaan tugas tetap terjaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

<b>1.</b>	Nama	<b>RENNY WULANDARI SE MM</b>
	NIK	<b>3576025101710001</b>
	Nama Bank/Perusahaan Lain	<b>Tidak Ada Kepemilikan Saham</b>
	Persentase Kepemilikan (%)	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	Nama	<b>RIRIN DWI SETYONINGSIH SE MM</b>
	NIK	<b>3576024812740007</b>
	Nama Bank/Perusahaan Lain	<b>Tidak Ada Kepemilikan Saham</b>
	Persentase Kepemilikan (%)	<b>0,00</b>

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

<b>1.</b>	Nama	<b>PROF. BADRI MUNIR SUKOCO, SE., MBA., PH.D.</b>
	NIK	<b>3578081109780008</b>
	Nama Bank/Perusahaan Lain	<b>Tidak Ada Kepemilikan Saham</b>
	Persentase Kepemilikan (%)	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	Nama	<b>HARI FITRIANTO, S.IP., M.IP.</b>
	NIK	<b>3578301507830001</b>
	Nama Bank/Perusahaan Lain	<b>Tidak Ada Kepemilikan Saham</b>
	Persentase Kepemilikan (%)	<b>0,00</b>

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain, sehingga tidak terdapat potensi benturan kepentingan dan independensi dalam pelaksanaan tugas tetap terjaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

#### Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	RENNY WULANDARI SE MM
	NIK	3576025101710001
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	RIRIN DWI SETYONINGSIH SE MM
	NIK	3576024812740007
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

#### Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	PROF. BADRI MUNIR SUKOCO, SE., MBA., PH.D.
	NIK	3578081109780008
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

<b>2.</b>	Nama	HARI FITRIANTO, S.IP., M.IP.
	NIK	3578301507830001
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

#### Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham tidak memiliki hubungan keuangan satu sama lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, sehingga independensi dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan tetap terjaga serta mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

#### Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

<b>1.</b>	Nama	RENNY WULANDARI SE MM
	NIK	3576025101710001
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
<b>2.</b>	Nama	RIRIN DWI SETYONINGSIH SE MM
	NIK	3576024812740007
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

#### Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

<b>1.</b>	<b>Nama</b>	<b>PROF. BADRI MUNIR SUKOCO, SE., MBA., PH.D.</b>
	<b>NIK</b>	<b>3578081109780008</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
<b>2.</b>	<b>Nama</b>	<b>HARI FITRIANTO, S.IP., M.IP.</b>
	<b>NIK</b>	<b>3578301507830001</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

#### Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, sehingga independensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing tetap terjaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

#### 1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp1.242.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp496.800.000

#### 1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp1.054.150.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp93.150.000

#### 1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp140.302.800
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp56.121.265

#### 1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

#### 1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
--	---------

Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

### 2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

### 2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

### 2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	<b>Rp9.287.400</b>
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	<b>Rp7.188.800</b>

#### 2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)      **0 orang**

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)      **Rp0**

Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)      **0 orang**

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)      **Rp0**

Paket remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memperhatikan prinsip kewajaran, kesetaraan, dan kinerja Bank. Remunerasi yang diberikan terdiri dari gaji, tunjangan, dan tantiem, yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sepanjang tahun pelaporan, tidak terdapat pemberian kompensasi berbasis saham, remunerasi lainnya, serta fasilitas tambahan seperti perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan fasilitas lainnya, sehingga menunjukkan bahwa kebijakan remunerasi yang diterapkan masih bersifat sederhana dan disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan keuangan Bank.

Kebijakan remunerasi tersebut tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, kinerja, dan keberlanjutan usaha Bank, serta tidak menimbulkan potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

## 12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

### 1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)      **2,68 : 1**

### 2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)      **1,26 : 1**

### 3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)      **1,25 : 1**

### 4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)      **2,72 : 1**

**5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi**

Rasio (a/b) **3,00 : 1**

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah pada PT BPR Surya Artha Utama Perseroda menunjukkan tingkat kesenjangan yang masih dalam batas wajar dan terkendali. Rasio gaji pegawai tertinggi terhadap pegawai terendah sebesar 2,68 : 1 mencerminkan struktur remunerasi yang relatif proporsional.

Selanjutnya, rasio gaji antar anggota Direksi sebesar 1,26 : 1 dan antar anggota Dewan Komisaris sebesar 1,25 : 1 menunjukkan adanya kesetaraan dalam pemberian remunerasi pada masing-masing organ, yang disesuaikan dengan peran, tanggung jawab, dan kinerja.

Perbandingan antara gaji tertinggi Direksi dengan gaji tertinggi Dewan Komisaris sebesar 2,72 : 1 serta dengan gaji pegawai tertinggi sebesar 3,00 : 1 menunjukkan bahwa kebijakan remunerasi telah disusun secara berjenjang dan mempertimbangkan struktur organisasi serta kontribusi masing-masing pihak.

Secara keseluruhan, kebijakan remunerasi yang diterapkan telah memperhatikan prinsip kewajaran, kesetaraan, dan kinerja, serta tidak menimbulkan kesenjangan yang berlebihan, sehingga tetap mendukung terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan keberlanjutan usaha Bank.

**13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun**

1.	Tanggal Rapat	15 Januari 2025
	Jumlah Peserta	12 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
Evaluasi kinerja Desember 2024, pencapaian target neraca dan laba rugi, pengendalian kualitas kredit, serta strategi peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga.		
2.	Tanggal Rapat	14 Februari 2025
	Jumlah Peserta	11 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
Evaluasi kinerja Januari 2025, optimalisasi penyaluran kredit produktif, penguatan manajemen risiko, dan peningkatan efisiensi operasional.		
3.	Tanggal Rapat	12 Maret 2025
	Jumlah Peserta	12 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
Evaluasi kinerja Februari 2025, peningkatan kualitas aset produktif, pengendalian kredit bermasalah, serta strategi peningkatan dana murah.		
4.	Tanggal Rapat	11 April 2025
	Jumlah Peserta	12 orang

**Topik/Materi Pembahasan:**

Evaluasi kinerja Februari 2025, peningkatan kualitas aset produktif, pengendalian kredit bermasalah, serta strategi peningkatan dana murah.

5.	Tanggal Rapat	16 Mei 2025
	Jumlah Peserta	7 orang

**Topik/Materi Pembahasan:**

Evaluasi kinerja April 2025, pengendalian biaya dana, peningkatan kualitas kredit, serta optimalisasi penempatan dana pada instrumen produktif.

6.	Tanggal Rapat	13 Juni 2025
	Jumlah Peserta	10 orang

**Topik/Materi Pembahasan:**

Evaluasi kinerja Mei 2025, optimalisasi penyaluran kredit, pengendalian AYDA, serta peningkatan efisiensi penggunaan dana agar tidak terjadi idle cash.

7.	Tanggal Rapat	11 Juli 2025
	Jumlah Peserta	10 orang

**Topik/Materi Pembahasan:**

Evaluasi kinerja Juni 2025, peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga, pengendalian biaya bunga, serta penguatan strategi penyaluran kredit konsumsi.

8.	Tanggal Rapat	15 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	12 orang

**Topik/Materi Pembahasan:**

Evaluasi kinerja Juli 2025, pengendalian kualitas kredit dan CKPN, optimalisasi penempatan dana, serta peningkatan efektivitas penghimpunan tabungan.

9.	Tanggal Rapat	12 September 2025
	Jumlah Peserta	12 orang

**Topik/Materi Pembahasan:**

Evaluasi kinerja Agustus 2025, peningkatan penyaluran kredit produktif, pengendalian AYDA, serta penguatan strategi likuiditas dan struktur pendanaan.

10.	Tanggal Rapat	10 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	13 orang

**Topik/Materi Pembahasan:**

Evaluasi kinerja September 2025, pengendalian biaya dana, peningkatan penghimpunan dana murah, serta penguatan struktur permodalan dan likuiditas.

11.	Tanggal Rapat	14 November 2025
	Jumlah Peserta	14 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> Evaluasi kinerja Oktober 2025, penguatan manajemen likuiditas, pengendalian pertumbuhan pinjaman, serta optimalisasi struktur pendanaan.		
12.	Tanggal Rapat	12 Desember 2025
	Jumlah Peserta	10 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> Tindak lanjut arahan November 2025 dan pengesahan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026, serta evaluasi kinerja November 2025.		

#### 14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

##### Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Badri Munir Sukoco
	NIK	3578081109780008
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	12 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hari Fitrianto
	NIK	3578301507830001
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	12 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Selama tahun 2025, Komisaris Utama hadir secara fisik dalam 12 kali rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, sedangkan anggota Dewan Komisaris hadir secara fisik dalam 11 kali rapat. Perbedaan jumlah kehadiran tersebut disebabkan karena anggota Dewan Komisaris tidak hadir pada 1 rapat di bulan Mei 2025. Secara umum, kehadiran Dewan Komisaris tetap menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

#### 15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

##### 1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

### 1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

### 1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

#### 1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Selama periode pelaporan tahun 2025, tidak terdapat kejadian penyimpangan internal (internal fraud) baik yang dilakukan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap, maupun pegawai tidak tetap. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern, manajemen risiko, serta fungsi kepatuhan di PT BPR Surya Artha Utama Perseroda telah berjalan secara efektif.

Upaya pencegahan fraud dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan budaya kepatuhan, penerapan prinsip kehati-hatian, serta pelaksanaan fungsi pengawasan oleh manajemen dan Dewan Komisaris. Selain itu, Bank juga telah menerapkan kebijakan dan prosedur Anti-Fraud yang mencakup aspek pencegahan, deteksi, pelaporan, dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan tidak ditemukannya kasus penyimpangan internal, Bank senantiasa berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern serta pengawasan secara berkelanjutan guna meminimalisir potensi terjadinya fraud di masa mendatang.

## 16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

### 1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	<b>0 kasus</b>
---	----------------

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	<b>0 kasus</b>
--	----------------

### 1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	<b>0 kasus</b>
---	----------------

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	<b>0 kasus</b>
--	----------------

Selama periode pelaporan tahun 2025, PT BPR Surya Artha Utama Perseroda tidak menghadapi permasalahan hukum baik perdata maupun pidana, baik yang telah selesai maupun yang masih dalam proses penyelesaian. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan operasional Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi tersebut juga mencerminkan penerapan fungsi kepatuhan, manajemen risiko, serta Sistem Pengendalian Intern yang berjalan secara efektif dalam memitigasi potensi risiko hukum. Bank senantiasa berkomitmen untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi serta meningkatkan pengawasan secara berkelanjutan guna mencegah timbulnya permasalahan hukum di masa yang akan datang.

### 17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama periode pelaporan tahun 2025, PT BPR Surya Artha Utama Perseroda tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Seluruh kegiatan operasional dan transaksi Bank telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan independensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi ini mencerminkan bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, khususnya dalam pengendalian benturan kepentingan, telah berjalan secara efektif serta didukung oleh kebijakan internal dan pengawasan yang memadai. Bank senantiasa berkomitmen untuk menjaga integritas dalam setiap pengambilan keputusan guna mencegah potensi benturan kepentingan di masa yang akan datang.

### 18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

#### Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	08 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Siswa SMP Santo Yosef
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian bantuan sosial berupa beasiswa pendidikan kepada siswa sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan akses pendidikan.
	Jumlah (Rp)	Rp1.200.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	08 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Siswa MTs Darussalam
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian bantuan sosial berupa beasiswa pendidikan kepada siswa dalam rangka mendukung keberlanjutan pendidikan.
	Jumlah (Rp)	Rp2.810.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	09 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Siswa SMP Bina Unggul Insani
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian bantuan sosial berupa beasiswa pendidikan guna membantu kebutuhan pendidikan siswa.
	Jumlah (Rp)	Rp1.204.000

4.	Tanggal Pelaksanaan	09 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Siswa SMP Mardi Putera
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian bantuan sosial berupa beasiswa pendidikan sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan.
	Jumlah (Rp)	Rp2.200.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	09 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Siswa SMP Mardi Putera
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian bantuan sosial berupa beasiswa pendidikan guna menunjang kegiatan belajar siswa.
	Jumlah (Rp)	Rp2.360.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	09 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Siswa SMK Kartika 1 Surabaya
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian bantuan sosial berupa beasiswa pendidikan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
	Jumlah (Rp)	Rp4.124.000
7.	Tanggal Pelaksanaan	20 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Siswa SMP PGRI Surabaya
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian bantuan sosial berupa beasiswa pendidikan sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan.
	Jumlah (Rp)	Rp1.150.000
8.	Tanggal Pelaksanaan	12 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masjid Al Ihsan Surabaya
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian bantuan sosial untuk fasilitas lingkungan berupa pembelian paving guna mendukung sarana ibadah masyarakat.
	Jumlah (Rp)	Rp9.600.000

9.	Tanggal Pelaksanaan	14 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Siswa SD Muhammadiyah 7 Jagir Surabaya
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian bantuan sosial berupa pelunasan biaya pendidikan untuk mendukung keberlanjutan pendidikan siswa.
	Jumlah (Rp)	Rp3.695.000
10.	Tanggal Pelaksanaan	14 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Siswa SD Muhammadiyah 7 Jagir Surabaya
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian bantuan sosial berupa pelunasan biaya pendidikan sebagai bentuk kepedulian terhadap siswa.
	Jumlah (Rp)	Rp2.425.000
11.	Tanggal Pelaksanaan	12 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	MI Ihyaussalafiyah
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian bantuan sosial berupa 1 set komputer guna mendukung kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah.
	Jumlah (Rp)	Rp6.500.000
12.	Tanggal Pelaksanaan	17 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Siswa SMA Giki 1 Surabaya
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian bantuan sosial berupa pelunasan biaya pendidikan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan siswa.
	Jumlah (Rp)	Rp2.860.000
13.	Tanggal Pelaksanaan	31 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Dinas Kesehatan Kota Surabaya
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian bantuan sosial berupa instalasi pengolahan limbah cair (IPLCRT) pada

		fasilitas kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
	Jumlah (Rp)	Rp45.485.000
14.	Tanggal Pelaksanaan	03 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Siswa SMP Kemala Bhayangkari 6 Surabaya
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian bantuan sosial berupa pembayaran tunggakan biaya pendidikan untuk membantu keberlanjutan pendidikan siswa.
	Jumlah (Rp)	Rp2.475.000
15.	Tanggal Pelaksanaan	03 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Siswa SMP Kemala Bhayangkari 6 Surabaya
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian bantuan sosial berupa pembayaran tunggakan biaya pendidikan sebagai bentuk dukungan pendidikan.
	Jumlah (Rp)	Rp2.475.000
16.	Tanggal Pelaksanaan	18 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Loka Batik Surabaya
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian bantuan sosial dalam bentuk sponsorship untuk mendukung kegiatan pengembangan usaha kreatif masyarakat.
	Jumlah (Rp)	Rp25.000.000
17.	Tanggal Pelaksanaan	28 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Siswa SMP Kreatif An-Nur Surabaya
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian bantuan sosial berupa pelunasan biaya pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar siswa.
	Jumlah (Rp)	Rp1.230.000
18.	Tanggal Pelaksanaan	28 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial

	Penerima Dana	Siswa SMA Labschool Unesa Surabaya
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian bantuan sosial berupa pembayaran tunggakan pendidikan guna membantu siswa melanjutkan pendidikan.
	Jumlah (Rp)	Rp5.250.000
19.	Tanggal Pelaksanaan	28 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	DISPORA Kota Surabaya
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian bantuan sosial berupa fasilitas tenda kegiatan untuk mendukung kegiatan masyarakat dan kepemudaan.
	Jumlah (Rp)	Rp19.900.000

Selama periode tahun 2025, PT BPR Surya Artha Utama Perseroda telah melaksanakan kegiatan pemberian dana untuk kegiatan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kegiatan tersebut terutama difokuskan pada bidang pendidikan, antara lain berupa pemberian beasiswa, pelunasan biaya pendidikan, serta bantuan pembayaran tunggakan pendidikan kepada siswa.

Selain itu, Perseroan juga memberikan bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial, seperti fasilitas pendidikan, sarana ibadah, serta dukungan terhadap fasilitas kesehatan dan kegiatan kemasyarakatan.

Seluruh kegiatan dilaksanakan secara selektif dan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung lingkungan sekitar. Sepanjang periode pelaporan, tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR SURYA ARTHA UTAMA PERSERODA untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 17 April 2025

PT. BPR SURYA ARTHA UTAMA PERSERODA

Disetujui Oleh,



**Renny Wulandari**  
Direktur Utama